



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp. 0541-741963 – 741803 – 741807 Fax.0541- 736003  
Email : [dishut.kaltim@gmail.com](mailto:dishut.kaltim@gmail.com)

Nomor : 935/ 4539 /DK-I/2015  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian IKU dan Kertas  
Kerja Perjanjian Kinerja Eselon  
II, III, IV

Samarinda, 13 Nopember 2015

**Kepada Yth :**

**Bapak Sekretaris Daerah Prov. Kaltim  
Cq. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim**

Di-  
Samarinda

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  
066/6003/Org tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penyampaian IKU dan Kertas  
Kerja Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV bersama ini kami sampaikan IKU dan  
Kertas Kerja Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

**Pih. KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEKRETARIS**

  
**Ir. SIGIT BUDI TJ.**  
REMBINA TK. I  
NIP. 19590129 198503 1 008

Lampiran Surat Plh. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

No. : 935 / 459 / DK-I / 2015

Tgl. : 12 November 2015

Hal : Penyampaian IKU dan Kertas Kerja Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
  
2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas Dekonsentrasi
  
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
  2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan;
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peredaran dan industri hasil hutan;
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya usaha ekonomi produktif di sekitar kawasan hutan	Jumlah Kabupaten yang memperoleh manfaat ekonomi dari sub sektor kehutanan	5 kab/kota	Banyaknya masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan	Laporan tahunan IUPHHK dan hasil monev	Jumlah desa yang dibina oleh IUPHH = 127 desa di 7 Kabupaten	Kabid Pembinaan Perindugan Hutan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan	KPH yang dikelola secara mandiri	10%	Belum optimalnya pengelolaan hutan oleh pemegang ijin dan belum terkelolanya kawasan hutan yang tidak dibebani ijin	1. Laporan pengelola hutan oleh pemegang ijin 2. Inventarisasi hutan dan sosial budaya masyarakat	Jumlah dokumen tahun 2016 (3 Dokumen) $\frac{\text{Jumlah dokumen yg diperlukan agar KPH dikelola secara mandiri}}{30 \text{ Dokumen}} \times 100\%$	Ka. UPTD KPH Santan, Bongan, Meratus
3	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	38.750 Ha	Meningkatnya produktifitas lahan kritis dan tutupan lahan dengan kegiatan penanaman baik didalam kawasan hutan (reboisasi) maupun diluar kawasan hutan (Penghijauan)	1. Data lahan kritis provinsi kalim 2. Jumlah penanaman oleh para pihak 3. Jumlah permohonan bantuan bibit penghijauan lingkungan	Luasan rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	Kabid Pembinaan Perindugan Hutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	50 Ha	Meningkatnya tutupan lahan pada kawasan mangrove yang kritis	1. Data Lahan Kritis Prov. Kaltim (Kawasan Mangrove)  2. Luas penanaman mangrove yang dilakukan para pihak	Luasan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Pemerintah melalui dana APBN dan APBD serta penanaman mangrove yang dilakukan oleh para pihak (swasta)	Kabid Pembinaan Perindungan Hutan

Samarinda, November 2015

Pih. KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEKRETARIS,

Ir. SIGIT BUDI T.J.

PEMBINA TK.I

NIP. 19590129 198503 1 008

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan serta tugas Dekonsentrasi

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peredaran dan industri hasil hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Nilai tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa disekitar kawasan hutan	Rp. 1.000.000,-	Mengukur pendapatan ekonomi produktif masyarakat di sekitar kawasan hutan	Laporan tahunan IUPHHK dan hasil monev	Selisih antara harga jual komoditas dikurangi biaya produksi	Kabid Pembinaan Perlindungan Hutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya manajemen pengelolaan hutan oleh KPH secara mandiri	Persentase tahapan proses menuju KPH yang dikelola secara mandiri	10%	Mengukur optimalnya pengelolaan hutan oleh pemegang ijin dan belum terkelolanya kawasan hutan yang tidak dibebani ijin	1. Laporan pengelola hutan oleh pemegang ijin	$\frac{\text{Jumlah dokumen tahun 2016 (3 Dokumen)}}{\text{Jumlah dokumen yg diperlukan agar KPH dikelola secara mandiri (30 Dokumen)}} \times 100\%$	Ka. UPTD KPH Santan, Bongan, Meratus
					2. Inventarisasi hutan dan sosial budaya masyarakat		
3	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	38.750 Ha	Mengukur produktifitas lahan kritis dan tutupan lahan	1. Data lahan kritis provinsi kaltim	Luasan rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	Kabid Pembinaan Perlindungan Hutan
					2. Laporan penanaman oleh para pihak		
					3. Laporan permohonan bantuan bibit penghijauan lingkungan		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	50 Ha	Mengukur tutupan lahan pada kawasan mangrove yang kritis	1. Data Lahan Kritis Prov. Kaltim (Kawasan Mangrove)  2. Laporan penanaman mangrove yang dilakukan para pihak	Luasan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Pemerintah melalui dana APBN dan APBD serta penanaman mangrove yang dilakukan oleh para pihak (swasta)	Kabid Pembinaan Perlindungan Hutan

Samarinda, 26 November 2015

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR







PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR		PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD		PERJANJIAN KINERJA ESELON III		PERJANJIAN KINERJA ESELON IV				
RPJMD		RENSTRA SKPD								
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN	IKU	TARGET NO.	PROGRAM	IK PROGRAM	TARGET NO.	KEGIATAN	IK KEGIATAN	TARGET
	3	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	1	Rehabilitasi hutan dan lahan	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	1	Rehabilitasi hutan dan lahan	1. Luas reboisasi (Tahura Bukit Suharto) 2. Penanaman rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Tol (Eks Kebakaran Hutan) 3. Pemeliharaan tanaman reboisasi 4. Publikasi / Expo luar daerah 5. Publikasi / Expo dalam daerah 6. Pemeliharaan Tanaman Arboretum	50 Ha 44 Ha 159 Ha 1 Kali 3 Kali 25 Ha
							2	Penanaman 1 Juta batang bibit	1. Jumlah bibit yang ditanam 2. Peringatan HMPI	100000 Batang 1 Kali

Samarinda, November 2015

KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**T. H. CHAIRIL ANWAR, MP**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570501 198503 1 020